

Implementasi Program Posyandu Lansia Terhadap Peningkatan Kesehatan Lansia di Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Syukuriansah Syukur, Safaruddin*, A. Ariyadi

ancasyukur@gmail.com, safaruddindr@gmail.com*,
kampusbarru@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi program posyandu lansia di desa Galung dan untuk mengetahui penghambat dalam proses implementasi program posyandu lansia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Posyandu Lansia di Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dari lima indikator yaitu, sasaran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, dari empat unsur tersebut telah terimplementasi dengan baik dan satu unsur yang tidak terlaksana dengan baik yaitu sumber daya, faktor yang menghambat dari implementasi Program Posyandu Lansia yaitu pertama pemahaman masyarakat mengenai pentingnya layanan kesehatan tidak terlalu di pahami secara baik, yang kedua adalah masyarakat yang lebih mementingkan pekerjaan dari pada memeriksakan kesehatannya di posyandu atau puskesmas setempat, ketiga yaitu pemahaman tradisional masyarakat yang mendahulukan pemahaman mistis dari pada pemahaman medis.

Kata Kunci: *Kebijakan, implementasi, pos pelayanan terpadu, lansia*

Abstract

This study aims to determine the process of implementing the elderly posyandu program in Galung village and to find out what are the obstacles in the process of implementing the elderly posyandu program. The results of this study indicate that the implementation of the Posyandu Elderly policy in Galung Village, Barru District, Barru Regency from five indicators, namely, policy goals and objectives, resources, organizational characteristics, attitudes of implementers, communication between implementing organizations, of the four elements have been implemented well and one element that is not well implemented is resources, factors that hinder the implementation of the Posyandu Lansia Program, namely the first public understanding of the importance of health services is not well understood, the second is that people are more concerned with work than checking their health at the posyandu or local health center, the third is the traditional understanding of the community that prioritizes mystical understanding over medical understanding.

Keywords: *Policy, implementation, integrated service post, elderly.*

*Korespondensi: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al Gazali Barru, Jl. Jend. Sudirman No. 41 Barru, (0427) 21871. info@stiaalgazali.ac.id. Syukriansa Syukur, Safaruddin, A. Ariyadi

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan urutan ke 4 terbesar jumlah penduduknya di dunia, menurut Zudan Arif Fakrulloh selaku Direktur jenderal kependudukan dan catatan sipil, menyatakan bahwa jumlah penduduk pada tanggal 30 Juni tahun 2022 tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 138.999.996 dengan persentase 54,48% dan perempuan 136.361.271 atau 49,52% sedangkan apabila dibandingkan dengan data tahun 2021 yang berjumlah 273.879.750, maka selama 6 bulan ini terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1.481.517 jiwa 0,54% (Tuwu & La Tarifu, 2023a).

Menyandang predikat sebagai negara dengan penduduk terbanyak nomor empat di Dunia tidak hanya menguntungkan bagi Indonesia, tetapi juga merugikan. Sisi positifnya berupa melimpahnya tenaga kerja usia produktif. Tetapi sisi negatifnya antara lain akan ada masalah-masalah besar seperti akses pendidikan dan kesehatan kurang memadai, banyaknya pengangguran, lapangan kerja terbatas, munculnya konflik dan tindakan kriminal, serta melahirkan persoalan sosial lainnya (Tuwu & La Tarifu, 2023b). Proporsi penduduk dunia yang memasuki usia lanjut semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Kelompok umur lanjut usia ini sudah menjadi isu dunia. Di negara- negara sedang berkembang, isu ini memang belum terlalu banyak dibahas seperti di negara-negara maju. Namun, tidak berarti tidak penting untuk diperbincangkan,

Banyak negara yang mulai aktif mengembangkan dan menerapkan kebijakan terkait dengan penuaan penduduk, rencana pengembangan mereka Selalu dikaitkan dengan isu penuaan penduduk. Karena dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk lansia adalah salah tanda keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial pada suatu negara. Orang hidup lebih lama karena nutrisi yang lebih baik, sanitasi, dan kemajuan teknologi medis Perawatan medis, pelayanan kesehatan, pendidikan dan manfaat ekonomi.

pada kasus ini Penuaan populasi dilihat sebagai aset, bukan beban (Roem, 2013).

Menurut Undang Undang Nomor.13 Pasal 1 Ayat 1 Pasal 1 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia berarti Lansia mengacu pada orang yang berusia 60 tahun ke atas (Tuwu & La Tarifu, 2023a). Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022 sudah jumlah lansia meningkat dari 18 juta pada tahun 2010 Pada tahun 2010 meningkat menjadi 25,9 juta pada tahun 2019. Diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2035, mencapai 48,2 juta orang. Total populasi lansia yang besar ini membutuhkan layanan sosial, program, kebutuhan dan perlakuan khusus (Tuwu & La Tarifu, 2023a).

Salah satu bentuk kebijakan yang di buat pemerintah untuk membantu mensejahterakan masyarakat khususnya kalangan lansia yaitu dengan mengadakan Program posyandu lansia. Posayandu lansia diluncurkan pemerintah Indonesia pada tahun 2010, khusus melayani serta menangani berbagai keluhan masyarakat mengenai kesehatan pada lanjut usia. Program tersebut ditujukan agar para lansia yang rentan terkena penyakit dapat hidup sehat, mandiri serta berdaya guna agar tidak menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. (Bafelannai & Wahyuni, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai posyandu lansia, yang diambil oleh penulis dan dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penulis dalam penyusunan proposal ini antara lain yaitu Implementasi Program Posyandu Lansia Untuk Menjaga Kesehatan Lanjut Usia, Oleh: (Tuwu & La Tarifu, 2023a) dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa program Posyandu Lansia dilaksanakan setiap satu kali dalam satu bulan, yang bertempat di kantor lurah setempat atau di tempat yang telah ditentukan oleh warga. Program pelayanan yang diberikan oleh Posyandu lansia kepada para lansia adalah seperti: pelayanan kesehatan, pemberian makanan tambahan, kegiatan olahraga, dan kegiatan non kesehatan seperti

kegiatan spiritual, arisan, kegiatan ekonomi produktif, penyaluran hobi, dan interaksi social dengan sesama lansia. Melalui kegiatan ini para lansia memperoleh manfaat kesehatan dan manfaat sosial, sehingga kesehatan dan kualitas hidup lansia bisa terjaga dengan baik.

Penelitian lain yang di lakukan oleh : (Hafizhah, Hanifah, & Katmawanti, 2021), Mengenai Posyandu Lansia Sebagai Upaya Pemberdayaan Guna Meningkatkan Derajat Kesehatan Lansia, yang memperoleh hasil dari penelitian ini adalah membahas pelaksanaan kegiatan posyandu lansia, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keaktifan lansia antara lain: 1) sikap, norma subyektif, kontrol perilaku, dan niat, 2) dukungan keluarga dan lingkungan sosial, 3) pengetahuan dan tingkat pendidikan, serta 4) jarak. Dengan adanya program ini, diharapkan Indonesia akan mengalami peningkatan angka harapan hidup melalui peningkatan kualitas hidup lansia agar lansia siap menghadapi usia lanjut dengan mandiri dan sehat.

Berdasarkan observasi yang telah di lakukan oleh Penulis Pelaksanaan Program Posyandu Lansia di Desa Galung masih belum berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat lansia yang kurang peduli dengan kegiatan tersebut, karena kesibukan masyarakat lansia yang rata-rata bekerja sebagai petani dan berkebun yang menjadi penghasilan utama masyarakat sehingga masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya ketimbang meluangkan waktu untuk memeriksa kondisi kesehatan mereka, selain karna faktor kesibukan salah satu hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Posyandu Lansia di Desa Galung yaitu masyarakat yang kurang peduli dengan kondisi kesehata dirinya sendiri.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, menurut Moleong (Salmaa, 2021), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian,

seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan melalui deskripsi berupa kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu yang wajar dan menggunakan berbagai ilmu alamiah.

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu, Peneliti berusaha mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi, terjun langsung ke lapangan menemui informan. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan implementasi program posyandu lansia terhadap peningkatan kesehatan lansia di Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Informasi yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks agar memudahkan pemahaman berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan, selain mendeskripsikan menggunakan teks peneliti juga menyajikan materi berupa foto penelitian untuk menegaskan dan menjelaskan hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat lansia sebagai penerima layanan posyandu lansia di Desa Galung, serta kader desa yang bertugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat serta bertugas sebagai pelaksana Posyadu Lansia, dan petugas puskesmas yang memeriksa kondisi kesehatan lansia serta menjadi pengelola program posyandu lansia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil

1. Implementasi Program Posyandu Lansia Di Desa Galung

Teori mengenai implementasi kebijakan bahwa pada dasarnya kebijakan itu apabila memenuhi indikator sasaran dan tujuan kebijakan, kebijakan mengenai hal ini tentunya peneliti memahami bahwa sasaran

suatu kebijakan pada dasarnya harus terlaksana dengan baik berdasarkan teori di kemukakan bahwa kinerja suatu kebijakan akan di ukur dari tingkat keberhasilannya dalam mencapai sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya sebagai bentuk komitmen pembuat kebijakan kepada objek kebijakan dalam hal ini adalah masyarakat apakah hal tersebut berjalan sesuai dengan sasaran dan ukuran di laksanakanannya kebijakan tersebut konsep ini dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn sehingga apa bila dilakukan penyesuaian oleh teori dan hasil penelitian maka di gambarkan hasil penelitian sebagai berikut, berdasarkan wawancara pada informan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terbagi atas 3 kelompok umur yaitu Pralansia, Lansia, dan usia rentang atau masyarakat yang berumur di atas 70 tahun, begitu pula sebagai tujuan dalam penyelenggaraan kebijakan ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat serta di harapkan melalui program ini dapat memberikan kontribusi terhadap aktivasi penggunaan BPJS bagi masyarakat pedesaan, secara khusus wawancara informan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara teori dan kondisi yang terjadi di lapangan dan juga di perkuat oleh gagasan-gagasan kader posyandu yang mana mendukung pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa orang-orang yang di layani adalah betul sesuai dengan sasaran dan tujuan kebijakan yang telah di tetapkan.

Gagasan yang terurai dari hasil penelitian dan teori juga di perkuat oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan pengamatan bahwa kondisi tersebut di dapatkan adanya tujuan kebijakan yang di sampaikan oleh para informan sebagai subjek pada penelitian ini maka peneliti melakukan observasi secara bertahap dan memastikan adanya kesesuaian pernyataan pernyataan yang telah di kemukakan oleh pelaksana kegiatan dan juga kepada para penerima layanan dalam hal ini adalah masyarakat lansia, maka tinjauan penelitian ini membenarkan bahwa apa

yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan tersebut di laksanakan berdasarkan antara hasil penelitian dan kondisi real di lokasi penelitian yaitu adanya masyarakat yang dilayani yaitu pralansia, lansia, serta masyarakat rentang yang berusia di atas 70 tahun, begitu pula pengamatan yang dilakukan oleh peneliti khususnya desa Galung khususnya masyarakat yang memiliki kartu BPJS yang tidak aktif di sebabkan tdk adanya konsultasi kepada Faskes(fasilita kesehatan) mengenai pelayanan kesehatan tersebut.

Karena itu peneliti berkesimpulan bahwa teori yang mana menjadi indikator terimplementasinya suatu kebijakan dalam hal ini adalah program posyandu lansia di desa Galung maka dapat di simpulkan bahwa kegiatan tersebut terimplementasi dengan baik di buktikan dengan adanya kesesuaian antara teori hasil penelitian dan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti.

Berbicara mengenai sumber daya pada dasarnya di konsepsikan bahwa dalam rangka menunjang terlaksananya suatu kebijakan di butuhkan setidaknya 2 sumber daya yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia dan sumber daya non manusia sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan begitu pula dengan sumber daya yang lain, hadirnya sumber daya manusia sebagai bentuk penyelenggara, pelaksanaan, penanggung jawab dan juga sebagai lokomotif penggerak dari sumber daya yang lain apabila tidak ada sumber daya manusia maka sudah dapat di pastikan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat berjalan karena tidak ada penggerak utama untuk melakukan kegiatan tersebut secara terarah terkontrol dan terkendali sebagaimana bahwa adanya manajemen maka hal tersebut akan di atur oleh manusia itu sendiri.

Aksesibilitas sumber daya manusia ini mencakup segala lini sebagai bentuk dukungan dalam mengoprasionalkan sumber daya yang lain uraian hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti di temukan bahwa sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pada program posyandu lansia

tersebut adalah adanya tenaga medis, kader posyandu yang telah terlatih oleh tim medis menyatakan bahwa adanya kesesuaian antara pekerjaan dengan orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut seperti mantre kesehatan yang bertugas di puskesmas dimana mereka telah terlatih memiliki keterampilan di bidangnya memiliki kemahiran dan kecekatan untuk memberikan pelayanan dari sisi kesehatan kepada masyarakat dimana hal ini sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya begitu pula dengan kader-kader posyandu yang telah terlatih secara medis untuk melakukan aktifitas dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari tenaga medis di posyandu tersebut sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini sumberdaya manusia saling membantu dan juga memiliki keterkaitan yang jelas dengan kader posyandu yang telah di latih.

Sumber daya non manusia yang menggambarkan kemampuan pelaksana dan penyelenggara untuk memastikan kegiatan tersebut dapat berjalan maka di harapkan adanya ketersediaan fasilitas, peralatan medis dan juga hal-hal penunjang yang lain sebagai bentuk peran sumber daya ini membantu sumber daya manusia dalam melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang tergolong dalam sumber daya non manusia adalah sarana dan prasarana pendukung yang dapat berupa alat-alat medis, gedung, kursi, meja dan fasilitas pendukung lain yang gunakan dalam pelaksanaan program posyandu lansia agar dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya untuk itu bersarkan hasil wawancara dan pengamatan yang di lakukan oleh peneliti maka di dapatkan hasil bahwa masih adanya keterbatasan dari sumber daya seperti gedung sebagai sarana pendukung utaman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat namun hal ini belum di miliki di sebabkan karena kecukupan sumber daya finansial belum mampu unuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga yang terjadi adalah inisiatif dari pemerintah desa yaitu hanya memanfaatkan lahan milik masyarakat untuk memberikan pelayanan sebagaimana terlihat di dua dusun

dalam pelaksanaan posyandu masih menggunakan rumah masyarakat untuk memberikan pelayanan oleh karena itu menjadi suatu kendala utama bagi para pelaksana untuk melakukan aktifitas yang lebih terbuka dalam melakukan pemeriksaann kesehatan secara mendalam kepada lansia.

Selanjutnya sumber daya yang lain yang masih berhubungan dengan sarana dan prasarana yaitu belum tersedianya kursi di pusat layanan tersebut sehingga masih menggunakan kursi pemilik rumah meskipun sebenarnya masih sementara di usahakan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengadakan kursi yang di gunakan oleh warga pada saat berada di pos tersebut, hal lain yaitu masih adanya peralatan yang belum memadai yaitu alat pengukur gula darah, kolesterol dan asam urat yang belum di miliki oleh posyandu tersebut sehingga dengan demikian kegiatan posyandu lansia di tinjau oleh aspek sumber daya manusia unsur terimplementasinya kegiatan posyandu tersebut namun disisi lain masih di temukan kekurangan dari sumber daya non manusia yaitu tidak adanya gedung, kursi layanan, alat pengukur kolesterol, gula darah dan asam urat, sehingga dapat di simpulkan bahwa kegiatan posyandu lansia di tinjau dari aspek sumber daya belum terimplementasi dengan baik di butikan dengan tidak terpenuhinya unsur sumber daya non manusia.

Pusat perhatian dalam implementasi kebijakan meliputi organisasi formal dan organisasi informal dimana hal ini di upayakan adanya struktur organisasi, regulasi, serta penataan manajemen yang baik menjadi suatu ukuran yang harus di nilai dalam menunjang terlaksananya suatu kegiatan yang mana di harapkan mampu berkontribusi positif kepada penerima manfaat, suatu hal kemudian harus di pahami bahwa hadirnya stuktur organisasi sebagai bentuk gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para penyelenggara sebagaimana di jelaskan bahwa untuk menjalankan tugas di butuhkan tatakelola yang baik sistem manajemen yang terarah pemantauan model pelayanan yang di berikan

adalah bukti adanya ketercapaian bahwa organisasi tersebut berjalan secara formal.

Hasil penelitian yang di temukan bahwa struktur organisasi telah menggambar dengan jelas di lokasi posyandu dengan ketentuan bahwa memiliki hirarki di mulai dari pemerintah desa tim medis dan kader posyandu artinya bahwa bagian ini telah mengisyratakan adanya keteraturan dalam rangka pelayanan warga masyarakat di posyandu lansia

Selanjutnya adanya regulasi yang di buat pemerintah sebagai tuntunan untuk menjalankan aktifitas kegiatan tersebut tentunya bahwa suatu pedoman menjadi acuan utama dalam proses tindak lanjut pelaksanaan kegiatan regulasi ini sangat jelas melalui peraturan menteri kesehatan untuk di jadikan sebagai acuan program ini, proses pelaksanaan tugas dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti di temukan bahwa mereka bekerja secara tersruktur dan sesuai dengan regulasi yang ada sehingga apa bila di temukan kekeliruan dalam pelaksnaannya maka seluruh agen pelaksana berupaya untuk tetap mengembalikan standar dan prosedur yang sesuai dengan srtuktur dan berdasarkan regulasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah dengan demikian bahwa pelaksanaan tugas tersebut menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab penuh untuk di lakukan secara hirarki dan juga bertanggung jawab dalam seluruh pengelolaanya secara pasti.

Maka dari itu peneliti berkesimpulan bahwa uraian teori dan hasil penelitian yang di ungkapkan sebelumnya dan di dukung oleh observasi peneliti bahwa indikator karakteristik organisasi telah terpenuhi dengan baik sebagaimana telah di jelaskan pada bagian sebelumnya diatas.

Sikap agen pelaksana menentukan kelayakan suatu program dan jaminan akan ketersediaan layanan yang baik kepada masyarakat dan juga mudahnya aksesibilitas yang di dapatkan oleh warga saat pelayanan berlangsung indikator ini menjadi suatu ketetapan bila dilakukan

pengukuran secara aktif kepada masyarakat artinya bahwa untuk memastikan penelitian ini sesuai dengan harapan maka peneliti lebih berfokus kepada penerima manfaat untuk menghindari kesalahan dalam pemberian informasi dan juga sebagai bentuk keakuratan data untuk meminimalisir hal-hal yang terjadi di atas

Pelaksana di haruskan untuk memiliki kemampuan untuk bersikap ramah kepada masyarakat mudah menerima informasi serta memahami secara mendalam mengenai persoalan-persoalan masyarakat yang di layaninya karena itu akan menjadi suatu ukuran penilaian baik atau tidaknya layanan tersebut bergantung dari bagaimana pelaksana memperlakukan masyarakat, perlakuan yang baik mendapatkan respon positif dari penerima layanan sebaliknya respon yang kurang baik akan mendapatkan tanggapan yang kurang baik bagi warga penerima layanan

Tinjauan praktis yang di dapatkan oleh peneliti dalam porses wawancara di temukan bahwa keramahan yang dilakukan oleh pelaksana itu sesuai dengan harapan masyarakat terlihat dalam hasil wawancara adanya sikap yang ramah sehingga masyarakat mudah untuk menerima para pelaksana dengan cara mereka bertutur berkomunikasi dan juga menginformasikan kepada masyarakat, pembuktian ini di dukun oleh pengamatan langsung oleh peneliti namun diasumsikan bahwa hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan para pelaksana merupakan warga lokal yang berada di lokasi psoyandu sehingga mereka telah saling mengenal dan memiliki emosional yang dekat sehingga baik prilaku dan tindakan telah di pahami oleh penerima layanan.

Begitu pula dengan hal lain yang di contohkan dalam sikap pelaksana bahwa untuk menunjang pelayanan yang baik para pelaksana bukan hanya melayani pada kegiatan posyandu saja tetapi juga di layani pada luar jam pelayana dimana paparan hasil penelitian di atas bahwa para kader posyandu biasanya memberikan vitamin kepada masyarakat dan langsung

membawa kerumahnya masing-masing di sertai dengan petunjuk penggunaannya, sebuah gambaran akan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui bukti-bukti tersebut di atas dan juga bentuk perhatian penyelenggara dalam menyukseskan program posyandu lansia. Maka dari itu uraian hasil penelitian di perkuat oleh pengamatan atau observasi yang di lakukan oleh peneliti maka peneliti berkesimpulan adanya sikap para agen pelaksana yang di tinjau secara teoretis memiliki relevansi yang jelas antara teori dan kondisi di lapangan begitu pula hasil pengamatan selama proses penelitian berlangsung.

Komunikasi yang dilakukan merupakan bentuk adanya koordinasi yang jelas antara pelaksana yang satu dengan yang lainnya jaminan akan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kegiatan ini tentunya di dukung oleh institusi atau lembaga yang lain agar supaya kegiatan ini berjalan lancar memiliki komunikasi yang baik antara agen pelaksana komunikasi ini dimaksudkan untuk adanya keseragaman informasi yang sampai kepada penerima manfaat dan juga di upayakan untuk menjaga stabilitas pelaksanaan program berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dengan melakukan konsultasi kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini kegiatan posyandu lansia mengharuskan komunikasi kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Barru sebagai bentuk wujud pelaksanaa dari kegiatan yang di lakukan di tingkat desa begitu pula komunikasi harus tetap terjaga di pihak Puskesmas dalam hal ini puskesmas palakka dan juga pemerintah desa Galung yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun dan RT setempat.

Ditemukan dalam hasil penelitian ini bahwa kosep di atas telah di lakukan oleh penyelenggara posyandu lansia di desa Galung di buktikan dengan adanya pelaporan setiap bulan oleh dinas kesehatan dan puskesmas begitu pula kepala desa setempat dalam hasil penelitian ini peneliti hanya melakukan wawancara terhadap informan *key* dimana informasi tersebut hanya di ketahui oleh orang tersebut dan juga didukung oleh pengamatan

peneliti melalui bukti-bukti administratif untuk di sampaikan kepada pemerintah tingkat atas begitu pula pada pihak lain yang terkait namun tidak dapat di dokumenatsikan mengingat hal tersebut adalah data yang sensitif yang tidak boleh di miliki oleh pihak lain.

Sebagai kesimpulan dalam indikator ini adalah terlaksananya komunikasi yang baik dan intens kepada pihak penyelenggara dengan demikian indikator komunikasi antar organisasi terkait berjalan sesuai dengan teori yang ada oleh karena itu bagian ini terimplementasi dengan baik.

2. Penghambat dalam Implementasi Program Posyandu Lansia di Desa Galung

Dalam implementasi kebijakan beberapa hal tentunya ada kendala yang di hadapi karena dapat di pastikan bahwa hambatan yang terjadi tentunya semua belum terlaksana dengan baik implementasi suatu kebijakan pada akhirnya memerlukan evaluasi saat di implementasikan kenapa, di sebabkan karena adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pembuat kebijakan untuk merencanakan hal-hal yang akan di lakukan baik dalam segi waktu tenaga biaya dan hal lain yang sangat erat hubungannya dengan proses implementasi kebijakan.

Kualifikasi hambatan dalam proses implementasi kebijakan akan mejadi temuan para pebuat kebijakan sebagai bentuk evaluasi yang kemudian harus sesegera mokin untuk di tindak lanjuti dan di berikan solusi yang terbaik dalam persoalan yang di temukan dalam implementasi kebijakan tersebut berbagai upaya yang dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dengan cara mengformulasikan kebijakan yang telah terlaksana, fomulasi tersebut mejadi bentuk ramuan sebagai kumpulan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah yang telah di buatkan. kebijakan untuk itu peran para aktor pembuat kebijakan harus tetap memperhatikan berbagai pendekatan yaitu pendekatan mengenai efisiensi

dan efektifitas dalam penyelenggaraan suatu kegiatan apa bila formulai telah berhasil maka di lakukan adopsi kebijakan untuk di turunkan mejadi suatu kebijakaan dan menerapkan di masyarakat untuk di lakukan.

Proses adopsi kebijakan pada dasarnya memiliki waktu yang lama untuk menganalisisnya sehingga dalam proses analisis tersebut tentunya tetap mengacu pada standar pembuatan kebijakan yang berpedoman pada nilai nilai manfaat lebih banyak di bandingkan dengan nilai ke mudoratannya oleh karena itu hal ini tentunya dalam implenatsi suatu kebijakaan melahirkan kelemahan yang di awalnya tidak mampu untuk di interpretasikan dan akan terbaca pada saat pelaksanaan kegiatan asumsi ini di dukung oleh berbagai bentuk kebijaka-kebijakan pemerintah yang mana ada yang bisa di terima dan tidak bisa di terima oleh masyarakat artinya bahwa keterbatasan aktor untuk menyesuaikan seacara keseluruhan dari kebijakan yang di buat sangat terbatas untuk menentukan kebijakan yang terbaik dan di terima secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil peneltian yang di lakukan oleh peneliti ditemukan bahwa paling tidak ada 3 hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini yang pertama minimnya pemahaman masyarakat mengenai kondisi kesehatan yang pada dasarnya harus terpantau secara rutin apalagi pada usia lansia di mana kondisi ini sebenarnya memerlukan perhatian dari tenaga kesehatan untuk mendukung kelangsungan hidup lansia tersebut adapun faktor yg kedua yaitu faktor pekerjaan di sebabkan karena adanya pemahaman masyarakat lebih mengfokuskan pada faktor pekerjaan saja dan tidak memperhatikan kondisi kesehatan sehingga yang terjadi adalah mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka dari pada memeriksakan kondisi kesehatan meraka ke posyandu lansia faktor ya ke tiga yaitu masih tertananmnya niali-nilai tradisional yang di anggap lebih berpengaruh dari pada pengobatan secara medis kondisi ini sebenarnya satu hal yang tidak biasa di pungkiri bahwa peran orang-orang terdahulu dalam meningkatkan

derajat kesehatan memang sangat berpengaruh tetapi yang terpenting adalah memastikan apa yang menyebabkan penurunan kondisi kesehatan kemudian di tindak lanjuti baik secara medis maupun non medis maka dari itu menurut hemat peneliti berdasarkan tiga faktor yang telah di ungkapkan di atas bahwa hal ini di butuhkan solusi yang terbaik dengan cara melakukan sosialisasi dan pendekatan secara emosional kepada setiap individu untuk memastikan kedepannya hal ini tdak mejadi hambatan.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan Posyandu Lansia di Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru berdasarkan kajian administrasi publik khususnya pada teori implementasi kebijakan dari lima indikator yaitu, sasaran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, dari empat unsur tersebut telah terimplementasi dengan baik dan satu unsur yang tidak terlaksana dengan baik yaitu sumber daya di karenakan masih belum terpenuhinya fasilitas pendukung seperti Gedung dan alat-alat medis yang di perlukan untuk menunjang terlaksananya kegiatan Posyandu Lansia.

Faktor yang menghambat dari implementasi Program Posyandu Lansia yaitu pertama pemahaman masyarakat mengenai pentingnya layanan kesehatan tidak terlalu di pahami secara baik, yang kedua adalah masyarakat yang lebih mementingkan pekerjaan dari pada memeriksakan kesehatanya di posyandu atau puskesmas setempat, ketiga yaitu pemahaman tradisioanal masyarakat yang medahulukan pemahaman mistis dari pada pamahaman medis.

Daftar Rujukan

- Bafelannai, F. P., & Wahyuni, S. (2021). *EFEKTIVITAS PROGRAM POSYANDU LANSIA "SEHAT CERIA" KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA*.
- Hafizhah, N. A., Hanifah, S. S., & Katmawanti, S. (2021). POSYANDU LANSIA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN GUNA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN LANSIA. *Universitas Negeri Malang*.
- Roem, T. (2013). *Memanusikan lanjut usia: Penuaan penduduk & pembangunan di Indonesia: kumpulan makalah & diskusi Lokakarya 'Penuaan Penduduk dan Pembangunan: Dokumentasi, Tantangan & Langkah Lanjut ', Yogyakarta, 19-20 November 2012* (Cetakan pertama). Sleman, Yogyakarta, Indonesia: SurveyMETER.
- Salmaa. (2021). Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya. Retrieved March 31, 2023, from Penerbit Deepublish website: <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Tuwu, D. & La Tarifu. (2023a). IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU LANSIA UNTUK MENJAGA KESEHATAN LANJUT USIA. *Journal Publicuho*, 6(1), 20–29. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.72>
- Tuwu, D. & La Tarifu. (2023b). IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU LANSIA UNTUK MENJAGA KESEHATAN LANJUT USIA. *Journal Publicuho*, 6(1), 20–29. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.72>